

THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS

Dwi Aditya Nurachman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran Bandung

dwi17018@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Public Accountability and the Financial Accounting System on the Quality of Financial Statements of Local Government of Bandung City. The study was conducted at the head of the financial subdivision and finance department at "dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah" and the head of the Inspector and Auditor of the Bandung City Inspectorate. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the heads of the financial subdivision and all financial employees, especially Accounting DPKAD, 21 people as well as to the head of the inspector and all Inspectorate auditors of 19 people, so that the total sample was 40 samples. The analysis in this study used multiple linear regression analysis. The results of the study show that public accountability and regional financial accounting systems influence the quality of regional financial statements.

Keywords: *Pubic Accountability, Financial Accounting System, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Menurut Desi Handayani (2012) Pengelola keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Dalam hal sektor publik, dana yang dikelola oleh Pemerintah dalam bentuk laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam pertanggungjawaban laporan keuangan adalah dilakukan secara transparansi. Laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit, digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Menurut Harry Wibawa (2015) bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik harus ditunjukkan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Diperlukannya tenaga-tenaga akuntansi yang terampil pada pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik,. Selain tenaga akuntansi yang terampil,

sistem dan prosedur pembukuan yang baik juga dapat dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Adhi & Suharjo (2013) masyarakat memberikan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government Governance*). Tuntutan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah menjalani pelayanan publik yang bermutu. Faktor keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap publik adalah laporan keuangan daerah yang memiliki kualitas yang memadai. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan opininya selama lima tahun. Penjelasan lebih lengkap dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Selama Tahun 2010 - 2014

Tahun	Opini								
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2010	34	6	343	66	26	5	119	23	522
2011	67	13	349	67	8	1	100	19	524
2012	120	23	319	61	6	1	79	15	524
2013	153	34	276	60	9	2	18	4	456
2014	252	47	247	46	5	1	35	6	539

(sumber :www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut, masih banyaknya terdapat opini tidak wajar dan tidak memperoleh opini yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem pelaporan informasi pemerintah daerah belum optimal.

Berkaitan dengan latar belakang dan fenomena tersebut, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sehubungan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, diantaranya hasil penelitian Tutun Hermawanto Botutihe (2013) yang menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Gorontalo. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Harry Wibawa (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ifa Ratifah (2012) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah kabupaten Karawang.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Ferdy Van Beest (2009:9) hal yang paling fundamental dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah menentukan konten informasi. Peningkatan konten informasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, tidak dapat menentukan kualitas pelaporan keuangan sendiri. Abdul Hafiz Tanjung (2013:14) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

1. Informasi yang Bermanfaat

Informasi yang relevan adalah informasi yang memenuhi kriteria sebagai informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan secara efisien, memproyeksikan masa depan, dan memperbaiki hasil informasi setelah dievaluasi dimasa lalu.

2. Andal

Informasi yang andal adalah informasi yang memiliki manfaat bagi setiap penggunanya, menyajikan informasi secara jujur dan objektif, dapat diidentifikasi, dan tidak menyesatkan dalam penyajiannya.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan

periode sebelumnya dan dapat diperbandingkan. Apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan maka informasi tersebut telah memenuhi karakteristik/ciri khas dari laporan keuangan pemerintah.

4. Dapat Dipahami

Informasi harus dapat dipahami oleh penggunanya. Penyajian informasi harus disajikan secara sederhana yang dapat mempermudah dalam memberikan pemahaman bagi para pengguna untuk dapat menggunakan informasi tersebut dengan baik dan benar serta dapat memberikan pengaruh yang tepat dalam pengambilan keputusan. Pengguna informasi diasumsikan harus mempunyai kompetensi terkait dengan operasional perusahaan. Selain itu pengguna informasi juga perlu memiliki wawasan yang luas untuk dipelajari lebih lanjut.

Akuntabilitas Publik

Menurut Peny (2014) akuntabilitas publik merupakan kegiatan publik yang dilakukan oleh penyelenggara yang diwajibkan dapat memberikan penjelasan dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan langkah-langkah dari rangkaian pengambilan keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban publik dari hasil dan kinerja, sedangkan menurut Abdul Halim (2012) akuntabilitas publik merupakan keharusan dalam memberikan pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan mengenai kinerja dan tindakan. Menurut Mahmudi (2012) terdapat lima (5) unsur-unsur akuntabilitas yang diwajibkan dimiliki lembaga publik antara lain :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran adalah suatu sikap untuk menghindari penyelewengan /penyalahgunaan suatu jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum merupakan penggunaan sumber dana publik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan mekanisme penggunaan pelaksanaan kegiatan/tugas yang dinilai sudah cukup baik yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan alternatif tujuan yang ditetapkan berdasarkan hasil

pertimbangan yang memberikan pencapaian program yang optimal dan biaya yang ekonomis.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diberikan terhadap DPR/DPRD dan masyarakat pada umumnya.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban pemerintah dan lembaga publik lainnya atas penggunaan dana publik secara optimal, tidak ada penyelewengan dana dan korupsi. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan serta transparan terhadap pihak luar.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Indra Bastian (2010:319) indikator dalam sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Pencatatan

- Sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

- Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
- penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.

e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.

f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

g. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.

3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Halim, Abdul, dan M.Syam Kusufi (2012:281) Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi dalam pelaporan - keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dan pelaporan keuangan, sedangkan menurut Moses Bukunya (2014) *“Performance information is necessary for the discharge of accountability and financial and accounting information is often emphasized in determining accountability”*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Penelitian tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah telah dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013). Pada penelitiannya, menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

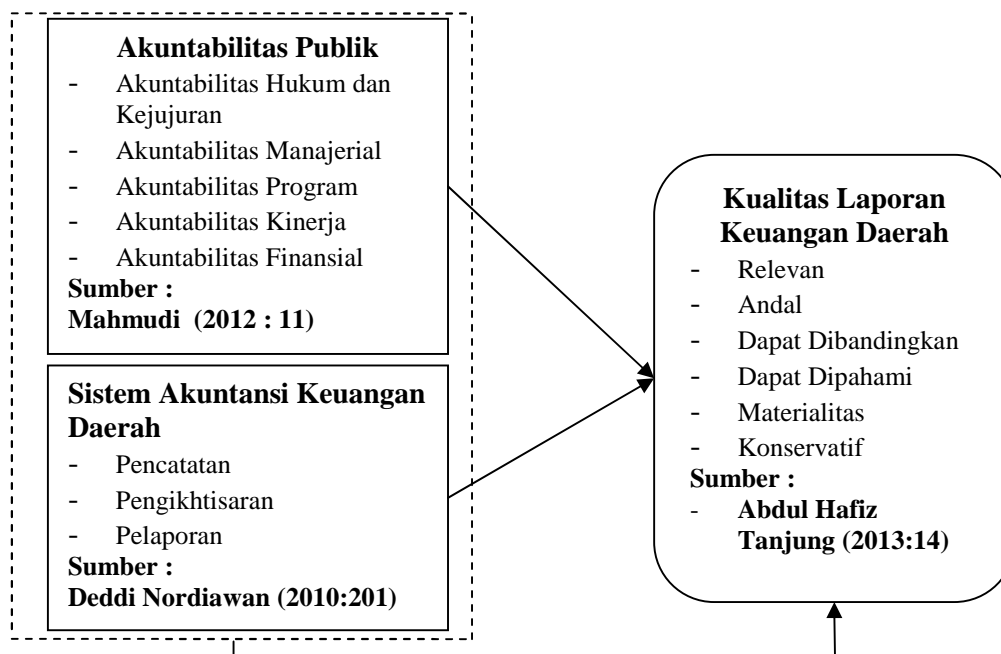
Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban kepada publik yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah, sehingga dengan begitu sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Luh Kadek, 2015). Menurut Lilis

Setyowati (2016) Laporan keuangan merupakan media bagi seluruh entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan yang handal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 :Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang memiliki arti nilai positivism, dari responden penelitian, sampel yang dijadikan penelitian dipilih secara acak/random, data yang dihimpun menggunakan instrumen penelitian, hipotesis yang telah diuji dan ditetapkan dilakukan berdasarkan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik.

Peneliti menggunakan metode survey untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan tersebut merupakan langkah-langkah dalam menghimpun suatu informasi yang dilakukan langsung di lapangan menggunakan ukuran kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui jawaban dari sampel atau

sebagian populasi terhadap fenomena penelitian (Zikmund, 2010).

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Inspektorat di kota Bandung. Peneliti menggunakan populasi yang berjumlah 40 orang responden, yaitu kepala subbagian keuangan dan staf subbagian keuangan (akuntansi) dan program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bandung yang berjumlah 21 orang dan Inspektur dan auditor yang melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah pada inspektorat Kota Bandung yang berjumlah 19 orang.

Analisis regresi yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi berganda. Menurut Sugiyono (2013 : 277) analisis regresi digunakan digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasinya (dinaik-turunkannya). Persamaan regresi berganda untuk dua prediktor yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = + {}_1x_1 + {}_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y= Kualitas Laporan Keuangan Daerah
= Koefisien Konstanta

${}_1 {}_2$ = Koefisien regresi

x_1 = Akuntabilitas Publik

x_2 =Sistem Akuntansi Keuangan

e =Tingkat kesalahan (*error*) pengaruh

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yang artinya bahwa jumlah populasi sama dengan jumlah sampel yang diteliti. Pengukuran data menggunakan teknik *skala linkert*. Hasil survey tersebut dapat digambarkan melalui angka-angka/nilai-nilai sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian

Penilaian	Jumlah Nilai	
	Positif	Negatif
Selalu/sangat memadai	5	1
Sering/lebih memadai	4	2
Kadang/cukup memadai	3	3
Jarang/kurang memadai	2	4
Tidak pernah/tidak memadai	1	5

Sumber : Data diolah (2016)

Untuk melakukan analisis, deskriptif jawaban responden dapat digunakan metode nilai indeks. Menurut Suliyanto (2018) untuk menjelaskan metode nilai indeks dalam analisis deskriptif jawaban responden dapat digambarkan sebagai berikut :

Rentang Skor Kategori :

$$\frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{5}$$

Keterangan :

a. Skor Maksimum = total sampel x total pernyataan x 5

b. Skor Minimum = total sampel x total pernyataan x 1

Peneliti melakukan analisis dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap masing-masing variabel. Kemudian nilai rata-rata tersebut dibagi dengan jumlah responden. Perhitungan nilai rata-rata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk Variabel X

$$Me = \frac{\sum X_1}{n}$$

Untuk Variabel Y

$$Me = \frac{\sum Y_1}{n}$$

Keterangan :

Me=Rata-rata

x_i =Jumlah nilai X ke-i sampai ke-n

y_i =Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n

n =Jumlah responden yang akan dirata-rata

Setelah diperoleh rata-rata masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil pembagian kuesioner

kepada responden. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti ambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) yang telah ditetapkan. Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sedangkan menghitung panjang kelas dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah kelas.

- a. Untuk variabel X_1 , Akuntabilitas Publik dengan 22 pernyataan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga :
- Nilai tertinggi $22 \times 5 = 110$
 Nilai terendah $22 \times 1 = 22$
 Lalu kelas interval sebesar $((110 - 22)/5) = 17,6$ maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut :

Tabel 3.5**Pedoman Kategorisasi Akuntabilitas Publik**

Nilai	Kriteria
22 - 38,6	Tidak Akuntabel
39,6 - 56,2	Kurang Akuntabel
57,2 - 73,8	Cukup Akuntabel
74,8 - 91,4	Akuntabel
92,4 - 110	Sangat Akuntabel

- b. Untuk variabel X_2 , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan 16 pernyataan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga :
- Nilai tertinggi $16 \times 5 = 80$
 Nilai terendah $16 \times 1 = 16$
 Lalu kelas interval sebesar $((80 - 16)/5) = 12,8$ maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut :

Tabel 3.5**Pedoman Kategorisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Nilai	Kriteria
16 - 27,8	Tidak Baik
28,8 - 40,6	Kurang Baik
41,6 - 53,4	Cukup Baik
54,4 - 66,2	Baik
67,2 - 80	Sangat Baik

- c. Untuk variabel X_2 , Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan 15 pernyataan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga :
- Nilai tertinggi $15 \times 5 = 75$
 Nilai terendah $15 \times 1 = 15$
 Lalu kelas interval sebesar $((75 - 15)/5) = 12$ maka penulis menentukan kriterianya sebagai berikut :

Tabel 3.7**Pedoman Kategorisasi Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Nilai	Kriteria
15 - 26	Tidak Berkualitas
27 - 38	Kurang Berkualitas
39 - 50	Cukup Berkualitas
51 - 62	Berkualitas
63 - 75	Sangat Berkualitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa data menunjukkan rata-rata memberikan jawaban setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntabilitas publik. Data kuesioner

menunjukkan bahwa dari 40 sampel jawaban mengenai akuntabilitas publik dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3**Hasil Data Penilaian Kuesioner Terhadap**

Pernyataan Mengenai Akuntabilitas Publik (X₁)	
No Resp	Akuntabilitas Publik (X₁)
1	88
2	90
3	89
4	80
5	91
6	92
7	89
8	94
9	89
10	88
11	87
12	92
13	92
No Resp	Akuntabilitas Publik (X₁)
14	90
15	92
16	90
17	91
18	91
19	96
20	97
21	90
22	88
23	94
24	95
25	98
26	99
27	92
28	94
29	95
30	93
31	90
32	97
33	92
34	90
35	96
36	93
37	96
38	96
39	93
40	97
Jumlah ()	3686
N	40
Rata-rata	92.1

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{3686}{40}$$

$$\text{Rata-rata/Mean} = 92,1$$

Pada variabel Akuntabilitas Publik dari 22 pertanyaan dan populasi yang berjumlah 40 responden diperoleh total nilai sebesar 3686, dari hasil seluruh nilai jawaban responden tersebut, dapat dihitung nilai rata-ratanya yaitu :

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{\sum x_1}{n}$$

Berdasarkan bobot nilai jawaban dari 22 pertanyaan terkait dengan akuntabilitas publik, dapat diketahui bahwa nilai tersebut terkait variabel akuntabilitas publik menunjukkan kriteria

yang “Akuntabel”. Nilai rata-rata berdasarkan tabel di atas adalah 92,1, yaitu diantara nilai “74,8 – 91,4”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil data lapangan untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1.4
Hasil Data Penilaian Kuesioner Terhadap
Pernyataan Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

No Resp	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)
1	64
2	77
3	66
4	79
5	70
6	67
7	75
8	67
9	72
10	72
11	68
12	71
13	71
14	70
15	72
16	70
17	71
18	68
19	73
20	76
21	73
22	63
23	70
24	69
25	69
26	74
27	71
28	66
29	74
30	71
31	63
32	65
33	64
34	65
35	72
36	73
37	73
38	70
39	69
40	70
Jumlah ()	2803
N	40
Rata-rata	70,1

Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah dari 16 pertanyaan dan populasi yang berjumlah 40 responden diperoleh total nilai sebesar 2803, dari hasil seluruh nilai jawaban responden tersebut, dapat dihitung nilai rata-ratanya yaitu:

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{\sum x^2}{n}$$

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{2803}{40}$$

$$\text{Rata-rata/Mean} = 70,1$$

Berdasarkan bobot nilai jawaban dari 16 pertanyaan terkait dengan sistem akuntansi

keuangan daerah, dapat diketahui bahwa nilai tersebut menunjukkan kriteria “Sangat Baik”. Nilai rata-rata berdasarkan tabel di atas adalah 70,1, yaitu diantara nilai “67,2 – 80”.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil data lapangan yang diperoleh pada kuesioner yang dibagikan mengenai kualitas laporan keuangan daerah yaitu

Tabel 1.5
Hasil Data Penilaian Kuesioner Terhadap
Pernyataan Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

No Resep	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
1	60
2	64
3	60
4	75
5	58
6	60
7	63
8	59
9	61
10	61
11	62
12	58
13	61
14	64
15	65
16	58
17	60
18	58
19	68
20	64
21	65
22	63
23	68
24	61
25	65
26	62
27	65
28	68
29	62
30	57
31	55
32	59
33	63
34	59
35	67
36	68
No Resp	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
37	59
38	59
39	62
40	61
Jumlah ()	2487
N	40
Rata-rata	62,2

Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan dari 15 pertanyaan dan populasi yang berjumlah 40 responden diperoleh total nilai sebesar 2487, dari hasil seluruh nilai jawaban responden tersebut, dapat dihitung nilai rata-ratanya yaitu :

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{\sum y}{n}$$

$$\text{Rata-rata/Mean} = \frac{2487}{40}$$

Rata-rata/Mean = 62,2

Berdasarkan bobot nilai jawaban dari 15 pertanyaan terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah, dapat diketahui bahwa nilai tersebut memiliki kriteria yang “Berkualitas”. Nilai rata-rata berdasarkan tabel di atas adalah 62,2, yaitu diantara nilai “51 – 62,2”.

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel

lain. Bentuk model persamaan regresi yang akan diestimasi model regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y= Kualitas Laporan Keuangan Daerah

β = Koefisien Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi

X_1 = Akuntabilitas Publik

X_2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

e = Tingkat kesalahan (*error*) pengaruh faktor lain

Tabel 1.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	-2.115	15.734		
X1	.422	.171	.873	1.145
X2	.351	.147	.873	1.145

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dari perhitungan yang telah diperoleh, maka dapat dibentuk persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,115 + 0,422 X_1 + 0,351 X_2 +$$

- a. Nilai konstanta bertanda Negatif sebesar = 2,115, artinya, jika Kualitas Laporan Keuangan Daerah tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yaitu Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- b. Akuntabilitas memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,422, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Akuntabilitas dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Koefisien regresi sebesar 0,422 mengandung arti untuk setiap pertambahan Kompetensi akan

menyebabkan meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

- c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,351, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Sistem Akuntansi Laporan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Koefisien regresi sebesar 0,351 mengandung arti untuk setiap pertambahan.

Koefisien Determinasi

Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh kedua variabel independen yang terdiri dari Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 1.7 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.575 ^a	.331	.295	3.25678	1.873

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Nilai *R-Square* sebesar 0,331 atau 33,1% pada tabel 1.7 artinya secara bersama-sama kedua variabel independen memberikan pengaruh sebesar 33,1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota

Bandung. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti sebesar 66,9% diantaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), transparansi, sumber daya manusia, *Good Government Governance*, Audit Internal.

Besar pengaruh secara parsial dapat diketahui dengan cara mengkalikan nilai koefisien

Beta dengan nilai koefisien *Zero Order*, sebagai berikut :

Tabel 1.8 Nilai Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Correlations
	Beta	Zero-order
(Constant)		
X1	.355	.477
X2	.343	.470

1. Besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah variabel $X_1 = 0,355 \times 0,477 = 0,170$ atau 17 %.
2. Besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah variabel $X_2 = 0,343 \times 0,470 = 0,161$ atau 16,1% , $X_1 + X_2 = 17\% + 16,1\% = 33,1\%$

Keuangan Daerah memberikan pengaruh yang lebih kecil terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung dibandingkan dengan pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas laporan keuangan Daerah.

Pengujian Secara Parsial

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. pada pengujian secara parsial dapat dilihat dari tabel dengan menggunakan program SPSS diperoleh *output* sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat diketahui bahwa Sistem Akuntansi

Tabel 1.9 Uji Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.115	15.734		-.134	.894
X1	.422	.171	.355	2.467	.018
X2	.351	.147	.343	2.386	.022

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien regresi sama dengan nol, maka H_0 diterima.

Berikut adalah pengujian hipotesis pada variabel akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Tabel 1.10 Pengujian Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis	Beta	Keputusan
$p = 0$	$p = 0,355$	H_0 ditolak dan H_a diterima

Sumber: Lampiran Output SPSS

Hasil yang diperoleh dengan melihat koefisien regresi menunjukkan koefisien regresi tidak sama dengan nol sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2012:281) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah.

Sedangkan pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh koefisien regresi menunjukkan koefisien regresi tidak sama dengan nol sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan

menerima H_a yang berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil tersebut, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.11
Pengujian Hipotesis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hipotesis	Beta	Keputusan
$p = 0$	$p = 0,343$	H_0 ditolak dan H_a diterima

Sumber: Lampiran Output SPSS

Pengujian Secara Simultan

Selain itu, kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_{03} = \beta_3 = 0$: Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

$H_{03} = \beta_3 \neq 0$: Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data dari seluruh populasi atau menggunakan sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi menggunakan uji t. Untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi, yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien regresi sama dengan nol, maka H_0 diterima.

Berikut adalah uji statistik hipotesis secara simultan pada variabel-variabel yang diteliti :

Tabel 1.12
Uji Hipotesis Pengaruh Simultan X terhadap Y

Hipotesis	Koefisien Regresi	Keputusan	Keterangan
$H_0 : p_1 = p_2 = p_3 = 0$	$p_1 = 0,422 ; p_2 = 0,351$	H_0 ditolak	Berpengaruh

Sumber: Lampiran Output SPSS

Hasil yang diperoleh dengan melihat koefisien regresi yang menunjukkan hasil koefisien regresi tidak sama dengan nol sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengujian analisis data deskriptif kuesioner Akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Penerapan Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kriteria “Akuntabel”, artinya Pemerintah Kota Bandung sudah melaksanakan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban

tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja SKPD dan kualitas laporan keuangan daerah. Mulai dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban kejujuran dan jaminan adanya penerapan hukum yang tegas, pertanggungjawaban penetapan kebijakan dimasa yang akan datang, dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung masih memiliki kekurangan, yaitu meliputi pertanggungjawaban dalam penerapan hukum yang tegas kepada setiap SKPD apabila

melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebesar 6,3%, pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien sebesar 6,9%, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program sebesar 4,2%, pertanggungjawaban dalam penetapan kebijakan pemerintah sebesar 13,3%, dan pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan sebesar 1,9%.

- b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”, artinya Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan prosedur dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung mampu melaksanakan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dengan sangat baik guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Namun demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung masih memiliki kekurangan, yaitu dalam hal kedisiplinan pembukuan data keuangan sebesar 3,9%.
- c. Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kriteria “Berkualitas”, artinya Pemerintah Kota Bandung sudah melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, materialitas dan konservatif. Namun demikian kualitas laporan keuangan daerah masih memiliki kekurangan yang cukup besar dalam hal pemahaman konsep materialitas yaitu sebesar 15%.
- d. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Akuntabilitas Publik secara parsial memberikan pengaruh sebesar 17%.
- e. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 16,1%.

- f. Secara simultan terdapat pengaruh dari Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengaruh simultan tersebut sebesar 33,1% maka dapat dikatakan bahwa secara simultan pengaruh kedua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dan penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Bandung sudah termasuk kategori “Akuntabel”, artinya Pemerintah Kota Bandung sudah melaksanakan pertanggungjawabannya. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada responden, masih ada yang menjawab “Tidak Pernah” dalam pertanggungjawaban penerapan hukum yang tegas seperti teguran bagi tiap SKPD yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, lalu pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program, pertanggungjawaban dalam penetapan kebijakan pemerintah, dan pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandung lebih meningkatkan pertanggungjawabannya dalam hal seluruh aspek guna mendapatkan kepercayaan yang lebih dari publik. Pemerintah Kota Bandung harus lebih memperhatikan hal-hal kecil yang dapat mempengaruhi tanggungjawabnya kepada publik, Dengan ini diharapkan Pemerintah Kota Bandung mampu memiliki

akuntabilitas yang tinggi guna meningkatkan kinerja Pemerintahan.

- b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung sudah sangat baik penerapannya, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu dalam hal kedisiplinan pembukuan data keuangan. Seharusnya pemerintah Kota Bandung lebih tegas lagi dalam menerapkan kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting dalam pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan. Dengan ini diharapkan Pemerintah Kota Bandung mampu meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandung lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman konsep materialitas. Kesadaran akan pentingnya konsep materialitas sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Dengan ini Pemerintah Kota Bandung diharapkan memiliki wawasan yang luas mengenai konsep materialitas.
- d. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih dengan menambahkan teori-teori yang lebih luas dan komprehensif pada variabel yang diteliti oleh penulis, serta menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, Vol.5, No.3 : 93-111.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit : Erlangga.
- Boutie, Tutun Hermawanto. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. *KIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1 : 1-14.
- Halim, Abdul dan M.Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handayani, Desi, 2012. *Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.5 : 12-26.
- Kusumastuti, Penny Lukito. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Penerbit : Grasindo.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit : Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan.
- Megawati, Luh Kadek Sri. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.3, No.1.
- Nordiawan, Deddy. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Penerbit: Salemba Empat.
- Ratifah, Ifa dan Mochammad Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, Vol.11, No.1 : 29-39.
- Setyowati, Lilis, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja Journal of Business and Economics*, Vol.20, No.2 : 179-191.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit : Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis, Disertasi*. Penerbit : Andi.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Cetakan Kedua*. Penerbit : Alfabeta
- Van Besst, Ferdy. 2009. *Quality of Financial Reporting : Measuring Qualitative Characteristics*. *Nice Working Paper*. Hal 1-14.

- Wibawa, Harry. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Zikmund, William G., et al. 2010. *Business Research Methods (Eight Edition)*. South Western, USA : Cengage Learning.